

DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA TERHADAP ETNIS

ROHINGYA 2017-2019

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RENALDI RIZKI SURYANDI

20323203

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA TERHADAP ETNIS
ROHINGYA 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RENALDI RIZKI SURYANDI

20323203

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Etnis Rohingya 2017-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Gustris Eni Putri, S.I.P., M.A.
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renaldi Rizki Suryandi
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 Maret 2000
Alamat : Jalan Aur Duri, Gang Pribadi, No.40 B, RT/RW 001/010, Kel. Pematangkapau, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau
NIM : 20323203
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Mei 2024



RENALDI RIZKI SURYANDI

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS ROHINGYA	16
2.1 Bantuan yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.....	16
2.2 Aktor-Aktor yang Terlibat.....	24
2.2.1 ASEAN (<i>Association of South-East Asian Nations</i>)	24
2.2.2 Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	25
2.2.3 <i>International Committee of The Red Cross (Komite Internasional Palang Merah)</i>	27
2.2.4 <i>Organisasi Kerjasama Islam</i>	28
2.2.5 <i>Bangladesh</i>	30
2.3 Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya.....	30
BAB 3 UPAYA DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA TERHADAP KONFLIK ROHINGYA	34
3.1 Indonesia Melakukan Negosiasi Akses terhadap Etnis Rohingya yang Membutuhkan Bantuan dan Perlindungan	34
3.2 Diplomasi Indonesia dalam Melakukan Monitoring Bantuan.....	38

3.2.1	<i>Kategori Bantuan Materiil</i>	39
3.2.2	<i>Kategori Bantuan Non-Materiil</i>	41
3.3	Diplomasi Indonesia dalam Melakukan Advokasi Untuk Tujuan Kemanusiaan	43
BAB 4	PENUTUP	47
4.1	Kesimpulan.....	47
4.2	Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rangkaian Pemberian Bantuan oleh Indonesia ke Etnis Rohingya, Myanmar Tahun 2017-2019.....	16
Tabel 2.2 Daftar 11 LSM yang tergabung dalam AKIM.....	19
Tabel 2.3 Jumlah Pengungsi Rohingya 2017-2019 di Bangladesh.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penandatanganan Perjanjian Hibah Antara Indonesia dan ASEAN Tahun 2019	23
--	----

ABSTRAK

Etnis Rohingya merupakan minoritas muslim di Myanmar. Etnis tersebut telah mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah atau etnis lainnya di Myanmar. Akibat dari tindakan diskriminasi tersebut membuat etnis Rohingya mencari suaka di negara lain yang akhirnya memicu krisis pengungsi. Untuk merespon krisis ini, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan yang mencakup bantuan dan perlindungan bagi korban. Diplomasi ini melibatkan negosiasi terhadap akses bantuan kepada etnis Rohingya, monitoring bantuan yang telah diberikan, dan melakukan advokasi dalam forum internasional. Dibandingkan dengan pendekatan dunia internasional yang menggunakan ancaman kekuatan untuk menekan pemerintah Myanmar, diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia dinilai lebih berhasil. Diplomasi ini berhasil membuka akses pemerintah Myanmar untuk menerima bantuan dari negara lain, dan membuat Bangladesh bersedia untuk melindungi pengungsi Rohingya.

Kata-kata kunci: Pengungsi, Rohingya, Myanmar, Indonesia, Diplomasi, Kemanusiaan

ABSTRACT

The Rohingya ethnic group is a Muslim minority in Myanmar. This ethnic group has experienced discrimination carried out by the government or other ethnic groups in Myanmar. As a result of this discrimination, the Rohingya ethnic group sought asylum in other countries, which eventually triggered a refugee crisis. In response to this crisis, Indonesia carried out humanitarian diplomacy that includes assistance and protection for the victims. This diplomacy involves negotiating access to aid for the victims, monitoring the aid that has been given, and advocating in international forums. Compared to the international approach that uses the threat of force to pressure the Myanmar government, the humanitarian diplomacy carried out by Indonesia is considered more successful. This diplomacy has successfully opened access for the Myanmar government to receive aid from other countries, and made Bangladesh willing to protect Rohingya refugees.

Keywords: *Refugee, Rohingya, Myanmar, Indonesian, Diplomacy, Humanitarian*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional, konflik etnis bukanlah fenomena yang baru. Salah satu konflik etnis yang paling mencuri perhatian dunia adalah konflik etnis Rohingya. Penyebab konflik ini menjadi perhatian dunia adalah karena banyak terjadi pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya tersebut (Fernandes, 2017). Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi penolakan status kewarganegaraan, penyangkalan identitas Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar, penghancuran pemukiman dan tempat ibadah, pengusiran massal, dan berbagai pelanggaran lainnya. Adapun tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintahannya sendiri yang seharusnya sebagai negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya (Kurniawan 2017).

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan studi mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap etnis Rohingya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah bahwa keduanya membahas masalah konflik yang sama yaitu etnis Rohingya. Perbedaannya bahwa dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada penanganan krisis di Rakhine saja, namun juga pada penanganan pengungsi yang berada di Bangladesh sebagai negara tujuan utama dari para pengungsi. Dan dalam penelitian ini diperlihatkan bagaimana peran Indonesia dalam menjembatani upaya penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu Myanmar dan Bangladesh.

Penelitian ini juga tidak hanya berfokus pada diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia, namun juga membahas mengenai bentuk bantuan yang

diberikan oleh Indonesia kepada pengungsi, yaitu bantuan dalam kategori materiil & non-materiil. Kemudian periode dan pendekatan yang diambil juga berbeda, dimana pada penelitian kali ini akan diambil rentang waktu dari 2017-2019. Dimana pada tahun 2017 terjadi peristiwa penyerangan terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sehingga menimbulkan banyak pengungsi yang melarikan diri ke negara tetangga. Kemudian pada tahun 2019, krisis pengungsi ini terus berlanjut dan semakin bertambah.

Bahkan konflik yang terjadi pada etnis Rohingya telah diakui oleh PBB sebagai *the most persecuted minority* dan juga mendapatkan julukan sebagai *the Gypsies of Asia* (Indra 2018). Julukan-julukan tersebut diberikan karena banyak tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintah maupun warga Myanmar lainnya. Perlakuan diskriminatif tersebut telah terjadi puluhan tahun lalu di Myanmar. Memang tidak hanya Etnis Rohingya yang menjadi korban tindakan diskriminasi. Masih ada etnis-etnis lain yang juga menerima tindakan diskriminasi. Namun, perbedaan kasus etnis lain dengan etnis Rohingya adalah karena hanya etnis Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negaranya sendiri (I. P. Setiawan and Suryanti 2021a).

Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1948 ketika Myanmar merdeka. Awal mula konflik terjadi adalah ketika terjadi tindakan persekusi terhadap etnis Rohingya yang kemudian semakin berkembang karena pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang kependudukan di Myanmar. Karena etnis Rohingya tidak ada di Myanmar sebelum kemerdekaan, kelompok minoritas Rohingya yang tinggal di Rakhine tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai warga negara. Myanmar menganggap kelompok Rohingya sebagai imigran gelap dan merupakan pelintas batas dari Bangladesh. Karena tidak dianggap sebagai

warga negara, orang Rohingya tidak memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak (Abdelkader 2017).

Berdasarkan laporan sebuah lembaga yang bernama MSF (*Medecins Sans Frontieres*), yang beranggotakan para Aktivis Kemanusiaan Dokter Lintas Batas menyatakan bahwa pada tahun 2017 sekitar 770.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan diperkirakan sekitar 9.000 muslim Rohingya meninggal di Myanmar. Laporan MSF juga menekankan bahwa jumlah korban yang dilaporkan kemungkinan hanya mewakili sebagian kecil dari total kematian, karena banyak korban yang tidak terhitung karena kondisi keamanan yang buruk dan akses yang terbatas untuk bantuan medis. Laporan tersebut menyatakan bahwa beberapa kematian akibat tindakan persekusi yang dilakukan oleh militer Myanmar (MSF 2017).

Dalam ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara yang dipandang sebagai negara yang paling besar dan terbuka untuk menjalin hubungan dengan negara lain (Fathun 2018). Oleh karena itu, sebagai negara tetangga Indonesia memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya. Sebagai negara yang berkomitmen pada hak asasi manusia, Indonesia terus mengupayakan penyelesaian yang adil dan damai untuk konflik tersebut. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Rohingya memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik tersebut (Sadewa, Heryadi, and Hidayat 2019).

Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, ASEAN juga telah membantu negara-negara anggotanya mengalami demokratisasi. Penanganan situasi di Myanmar adalah contohnya. ASEAN mengutamakan prinsip non-intervensi dan pendekatan diplomatis. Saat pertemuan ke-42 ASEAN di Thailand, PM Thailand menyoroti bahwa pendekatan *Asean Way* lebih efektif daripada memberlakukan

sanksi terhadap Myanmar. Pendekatan ASEAN berfokus pada meyakinkan pemerintah Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendorong tindakan strategis yang diperlukan untuk mengurangi tingkat kekerasan di Myanmar. ASEAN tidak melihat dirinya sebagai pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap negara-negara anggotanya. Sebaliknya, dia melihat dirinya sebagai forum tempat orang berbicara tentang masalah (Santri, Zein Abdullah, and Syahartijan 2018).

Selain itu, ditegaskan juga bahwa Myanmar harus melakukan sesuatu yang nyata dan progresif untuk mendorong perundingan damai dengan kelompok etnis bersenjata. Prinsip non-intervensi yang selama ini telah diterapkan ini telah membuat Asia Tenggara menjadi lebih stabil. ASEAN mampu menghasilkan keterlibatan aktif dan rasa kepemilikan bersama di antara anggota, selain menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan politik di wilayah tersebut (Rahmawati and Zakiyuddin 2022).

Indonesia telah secara aktif membantu berbicara dan bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat di Myanmar untuk mendukung kebijakan yang mendukung proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip non-intervensi ASEAN, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas di kawasan, dipegang teguh oleh pendekatan Indonesia. Namun, pendekatan ini juga mendorong negara-negara anggota untuk mengambil tindakan konstruktif dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia (Untoro, Idris, and Hardiwinoto 2016).

Indonesia juga berusaha untuk meningkatkan peran ASEAN dengan mendukung upaya Myanmar untuk memulai perundingan damai dengan kelompok etnis bersenjata. Selama ini, Indonesia bertindak proaktif dalam diplomasi dengan membantu berbagai kelompok berbicara. Tujuannya adalah untuk menciptakan

kondisi yang mendukung perdamaian dan proses demokratisasi di Myanmar (Bangun 2018).

Isu yang berkaitan dengan konflik kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya telah menjadi fokus perhatian masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Indonesia terkenal dengan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Dalam situasi ini, *bebas* tidak lagi berarti netral terhadap ideologi tertentu; sebaliknya, itu berarti kemampuan untuk bekerja sama dengan negara manapun untuk kepentingan negara. Sedangkan *aktif* berarti aktif untuk menjaga ketertiban dunia yang sesuai dengan cita-cita UUD'45 (Matthew 2020).

Dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan dan memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik secara bilateral maupun multilateral (Wahyudi and Niko 2023). Selama periode 2017-2019, Indonesia terus mengambil tindakan yang konkrit untuk membantu mengatasi krisis Rohingya, termasuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi, serta memperjuangkan hak-hak Rohingya di forum internasional seperti PBB dan OKI (Listiarani 2021). Pada tahun 2017, Indonesia yang diwakili oleh Menlu Retno Marsudi bertemu dengan bertemu dengan Konsular Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jendral U Min Aung Hlaing. Pada pertemuan tersebut Menlu Retno mengusulkan sebuah solusi penyelesaian isu kemanusiaan yang disebut *Formula 4+1* (Suwandari and Sugito 2021). Selain itu, pada tahun yang sama pemerintah Indonesia telah 8 kali melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Bangladesh, tempat dimana pengungsi Rohingya berada (Rini and Sugiyarto 2017).

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo dan Win Myint, Presiden Republik Persatuan Myanmar, mengadakan pertemuan bilateral di Singapura. Presiden

Jokowi berbicara tentang awal kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia saat pertemuan tersebut. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia siap membantu Myanmar melalui diplomasi bilateral dan bantuan kemanusiaan (Sekretariat Kabinet RI 2018). Selain itu, Indonesia memberikan hibah sebesar Rp7,5 miliar untuk membantu para pengungsi Rohingya yang diangkut dari Cox's Bazar, Bangladesh, ke Myanmar pada tahun 2019 (Pramudyani and Anthoni 2019). Dalam periode pandemi Covid-19, Indonesia memberikan bantuan senilai USD 200.000 atau sekitar Rp 28,5 miliar kepada Myanmar melalui *ASEAN Coordinating for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre) dalam bentuk perlengkapan medis, seperti masker KN95, sarung tangan medis, dan Alat Pelindung Diri (APD) (Kementerian Luar Negeri RI 2021).

Orang Rohingya sering menjadi korban konflik yang menjadi bagian dari masyarakat mayoritas Myanmar. Karena konflik yang terjadi dan mengakibatkan banyak korban jiwa dari etnis Rohingya, banyak orang yang mengungsi ke negara-negara dekat Myanmar untuk mencari suaka. Masyarakat Rohingya memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka untuk menghindari operasi militer pemerintah Myanmar. Gelombang pengungsian tahun 2017 adalah salah satu contohnya. Hanya dalam waktu satu bulan, jumlah pengungsi etnis Rohingnya dari bulan Agustus hingga September mencapai 123.000 orang (BBC 2017).

Indonesia telah berusaha sejak lama untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh kelompok Rohingya. Sekarang mereka berusaha untuk melakukan diplomasi kemanusiaan untuk memastikan bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan Menteri Luar Negeri RI yaitu Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara pertama di dunia yang

bersedia ikut ambil peran dalam upaya menyelesaikan kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar (Albayumi, Hadi, and Susilo 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: bagaimana upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam penyelesaian konflik etnis Rohingya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Menganalisis bagaimana upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya tahun 2017-2019.

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan studi mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap etnis Rohingya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah bahwa keduanya membahas masalah konflik yang sama yaitu etnis Rohingya. Perbedaannya bahwa dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada penanganan krisis di Rakhine saja, namun juga pada penanganan pengungsi yang berada di Bangladesh sebagai negara tujuan utama dari para pengungsi. Dan dalam penelitian ini diperlihatkan bagaimana peran Indonesia dalam menjembatani upaya penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu Myanmar dan Bangladesh. Penelitian ini juga tidak hanya berfokus pada diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia, namun juga

membahas mengenai bentuk bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada pengungsi, yaitu bantuan dalam kategori materiil & non-materiil.

Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap etnis Rohingya. Untuk menjaga fokus pada masalah utama, penelitian ini membatasi waktu antara tahun 2017 hingga 2019. Dimana pada tahun 2017 terjadi peristiwa penyerangan terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sehingga menimbulkan banyak pengungsi yang melarikan diri ke negara tetangga. Kemudian krisis pengungsi ini terus berlanjut, namun upaya repatriasi yang dilakukan pada tahun 2019 gagal karena pengungsi Rohingya tidak mau kembali ke Myanmar. Mereka khawatir akan masalah keamanan dan tidak ada jaminan status kependudukan jika kembali.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu-isu kemanusiaan di kawasan, salah satunya konflik Rohingya. Referensi jurnal dan penelitian dengan cakupan topik serupa menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa studi yang relevan yang telah dilakukan terkait isu tersebut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Joko Waluyo dalam *Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2* yang berjudul “*Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*”. Penelitian tersebut menggambarkan konflik yang tidak seimbang antara etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Penelitian ini juga menjelaskan faktor awal penyebab dan pemicu konflik tersebut yang kemudian berkembang menjadi kekerasan dan pembunuhan terhadap etnis Rohingya yang

terjadi dengan sangat tidak adil. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa konflik ini bersifat laten dan dapat terjadi kapan saja meskipun hanya dipicu oleh masalah sederhana (Waluyo 2013).

Dalam penelitian yang juga dilakukan oleh Tirza Listiarani dalam *Jurnal PIR: Power in International Relations, Vol. 5 No. 1* yang berjudul “*Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia*”. Studi ini menganalisis bagaimana tindakan pemerintah Indonesia terhadap kedatangan pengungsi Rohingya ketika mereka sampai di Provinsi Aceh pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut dijelaskan alasan mengapa Indonesia menerima pengungsi Rohingya secara sementara, sedangkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand berhenti menerima pengungsi dalam beberapa tahun kedepan. Penelitian ini dijawab dengan metode kualitatif dan menggunakan perspektif Human Security dan faktor determinan eksternal dan internal dari kebijakan luar negeri (Listiarani 2021).

Ketiga, penelitian yang berjudul *Peranan Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar (2014-2017)* yang ditulis oleh Indah Nur Azizah. Tulisan ini membahas bagaimana Indonesia memainkan peran penting dalam membantu menangani masalah Rohingya melalui jalur politik dengan pemerintahan Myanmar. Menurut penelitian ini, Indonesia menawarkan solusi untuk menghentikan kekerasan dan membantu orang Rohingya di Myanmar. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar, selalu mendukung semua proses pemerintahan Myanmar dan menghormati kedaulatan negara tersebut. Teori Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia digunakan untuk menganalisis penelitian ini (Azizah 2017).

Terakhir, penelitian Hardi Alunaza dan M. Kholit Juani yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh dari tahun 2012 hingga 2015*. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara yang tidak menandatangani perjanjian pengungsi internasional, tetap bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah pengungsi internasional. Tulisan ini membahas tiga kebijakan penting yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. Pertama, pemerintah mengubah peraturan yang sudah ada tentang masalah pengungsi dan memberikan penampungan sementara kepada pengungsi. Ketiga, pemerintah bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. Teori sekuritisasi migrasi digunakan untuk menganalisis penelitian ini (Alunaza and Juani 2017).

Pada penelitian sebelumnya yang disebutkan diatas, telah dilakukan studi mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap etnis Rohingya. Persamaan antara penelitian di atas dan penelitian penulis adalah bahwa keduanya membahas masalah konflik yang sama yaitu etnis Rohingya. Perbedaanya bahwa dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada penanganan krisis di Rakhine saja, namun juga pada penanganan pengungsi yang berada di Bangladesh sebagai negara tujuan utama dari para pengungsi. Dan dalam penelitian ini diperlihatkan bagaimana peran Indonesia dalam menjembatani upaya penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu Myanmar dan Bangladesh. Penelitian ini juga tidak hanya berfokus pada diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia, namun juga membahas mengenai bentuk bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada pengungsi, yaitu dalam kategori materiil & non-materiil. Kemudian periode dan pendekatan yang diambil juga berbeda, dimana

pada penelitian kali ini akan diambil rentang waktu dari 2017-2019. Dimana pada tahun 2017 terjadi peristiwa penyerangan terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Pada tahun 2019, upaya repatriasi yang dilakukan terhadap pengungsi gagal karena mereka menolak untuk kembali.

1.6 Kerangka Pemikiran

Diplomasi memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah diplomasi kemanusiaan, yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Saat berbicara tentang masalah kemanusiaan, membantu orang yang membutuhkan dalam situasi darurat dapat dianggap sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan. Namun, apa sebenarnya arti diplomasi kemanusiaan? Larry Minear dan Hazel Smith dalam bukunya yang berjudul "*Humanitarian Diplomacy: Practitioner and their Craft*", mendefinisikan diplomasi kemanusiaan sebagai upaya yang diperlakukan oleh pelaku, baik itu negara maupun non-negara, untuk memperoleh akses ke masyarakat yang terkena dampak krisis di suatu negara dijalankan melalui diplomasi kemanusiaan. Secara keseluruhan, teori ini menekankan pentingnya diplomasi kemanusiaan dalam menangani konflik dan krisis, serta peran penting yang dimainkan oleh aktor-aktor dalam proses ini.

Untuk mencapai tujuan, diplomasi kemanusiaan tidak menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan (*coercive diplomacy*). Pendekatan tersebut dianggap tidak efektif dalam konteks diplomasi kemanusiaan karena dianggap kurang tepat dan efisien sebagai instrumen yang dapat mencapai tujuan tersebut. Intervensi kemanusiaan dianggap sebagai kegagalan dalam diplomasi kemanusiaan, karena untuk mencapai tujuan tersebut bisa dilakukan tanpa perlu

menggunakan kekuatan militer yang dapat merugikan dan mengancam kehidupan manusia (Minear and Smith 2007).

Dalam perkembangan dinamika hubungan internasional yang semakin maju, diplomasi kemanusiaan tidak lagi menjadi tanggung jawab aktor negara (state actor), melainkan juga melibatkan aktor non-negara (non-state actor). Pihak-pihak yang terlibat dapat berasal dari berbagai organisasi non-pemerintah atau individu. Secara nyata, diplomasi kemanusiaan mencakup partisipasi luas, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah yang bersatu untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan bermartabat. Dibandingkan dengan jenis diplomasi lain, diplomasi kemanusiaan membedakan dirinya dengan sifat yang lebih *ad hoc* yang dimana dilakukan dengan cara yang tidak biasa dan tergantung dari kondisi krisis, serta melibatkan banyak aktor (Minear and Smith 2007).

Diplomasi kemanusiaan, menurut perspektif ini, memiliki dasar yang kuat pada nilai atau norma yang terkait dengan kemanusiaan. Nilai-nilai ini perlu dipersepsikan secara berbeda jika dibandingkan dengan konsep diplomasi lain. Diplomasi-diplomasi tersebut umumnya didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat materialis, sedangkan diplomasi kemanusiaan lebih menekankan pada aspek nilai dan normatif terkait dengan kepedulian terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan memperlihatkan dimensi yang lebih mendalam dan kondisional, mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari kepentingannya (Minear and Smith 2007).

Berdasarkan penjelasan Minear & Smith (2007), terdapat 3 aspek kunci yang menjadi parameter dalam proses diplomasi kemanusiaan yaitu pertama, melakukan negosiasi terhadap akses bantuan kepada penduduk sipil. Aktor kemanusiaan berusaha menegosiasikan kepada pemangku kepentingan seperti

pihak-pihak yang berkonflik, pemerintah setempat atau organisasi internasional, untuk mendapatkan akses kepada penduduk sipil dalam memberikan bantuan dan perlindungan.

Kedua, setelah akses diperoleh, bantuan kemanusiaan harus disampaikan secara efektif dan efisien kepada mereka yang membutuhkannya. Ini melibatkan koordinasi atau monitoring dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan lainnya dan pemerintahan setempat agar memastikan bahwa bantuan tersebut mencapai sasaran dengan tepat.

Ketiga, melakukan advokasi untuk tujuan kemanusiaan yaitu perlindungan hak-hak warga sipil dan penyelesaian damai konflik. Ini melibatkan lobi dengan pemerintah, organisasi internasional, atau media. Tiga parameter tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk mengkaji upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik etnis Rohingya.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya selama periode 2017-2019. Upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia dinilai lebih berhasil dibandingkan diplomasi yang menggunakan kekuatan ancaman untuk menyudutkan pemerintah Myanmar. Diplomasi tersebut terdiri dari melakukan negosiasi akses terhadap bantuan yang akan diberikan, memberikan dan memantau bantuan yang diberikan kepada etnis Rohingya, serta melakukan advokasi di forum internasional. Melalui analisis penulis, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia berhasil membuat Myanmar untuk membuka akses pemerintah

Myanmar dalam menerima bantuan dari negara lain, dan membuat Bangladesh bersedia untuk melindungi pengungsi Rohingya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Studi kasus akan dilakukan dan teori akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan konflik Rohingya di Myanmar dari tahun 2017 hingga 2019.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Indonesia yang melakukan diplomasi kemanusiaan. Sedangkan objek penelitiannya adalah konflik Rohingya. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya, dengan fokus pada aspek diplomasi kemanusiaan dalam hubungan internasional.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berita, buku, jurnal, artikel, dan laporan yang mengandung fakta dan literatur terkait, termasuk sumber-sumber di internet. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan mendukung penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti website, jurnal, dan kajian literatur. Data-

data ini akan dipilih dengan selektif sesuai dengan kredibilitasnya. Kemudian, sub-bab penelitian yang relevan akan dianalisis dan kesimpulan akan dibuat berdasarkan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap seluruh uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab ini membahas isu-isu yang terkait dengan sejarah konflik dan menjadi latar belakang diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap krisis Rohingya di Myanmar. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang hingga sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memperjelas aspek penelitian dan tujuan dari penelitian ini.
2. Pada bab ini berisi tentang bagaimana respon Indonesia terhadap krisis Rohingya dengan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya, dan siapa saja aktor yang terlibat serta berbagai bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.
3. Bab III berisi tentang analisis penulis mengenai upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap konflik etnis Rohingya.
4. Bab IV, peneliti akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini serta memberikan rekomendasi untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB 2

RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS ROHINGYA

2.1 Bantuan yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam melakukan upayanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya yakni dalam bentuk memberikan bantuan. Pada sub bab ini akan dibahas apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh Indonesia terhadap etnis Rohingya. Bantuan ini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan penyelesaian jangka panjang terhadap krisis kemanusiaan tersebut.

Tabel 2.1 Rangkaian Pemberian Bantuan oleh Indonesia ke Etnis Rohingya, Myanmar Tahun 2017-2019

Tahun	Rangkaian Monitoring Bantuan Materil
2017	<p>Pemberian bantuan oleh Indonesia kepada etnis Rohingya di Myanmar, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemberian 10 kontainer berisi bantuan kemanusiaan yang terdiri dari sarung, mie instan, terigu, biskuit dan sereal untuk bayi.- Pemberian bantuan kemanusiaan hingga bernilai 2 juta US\$.- Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Myaung Bwe, wilayah utara Rakhine, Myanmar.- Bantuan melalui program <i>Humanitarian Assistance for Sustainable Community</i> (HASCO) senilai 2 juta US\$

2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia melibatkan ASEAN dan ICRC. - Pemberian bantuan distribusi makanan dan alat kesehatan pada hampir 50.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh
2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Sakit Indonesia telah mencapai tahap 91,1%. - Pelaksanaan Hibah Repatriasi Pengungsi di Rakhine, Myanmar oleh Indonesia melalui ASEAN, hingga dengan RP. 7,5 Miliar

Sumber: Olahan Penulis Dari Referensi Data

Pada awal tahun 2017 Pemerintah Indonesia mengirimkan sepuluh kontainer berisi bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya di Myanmar. Isi bantuan tersebut mencakup beberapa kontainer yang berisikan mie instan, sarung, tepung terigu, biskuit serta sereal untuk bayi. Presiden Jokowi secara langsung melepas bantuan ini di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemerintah Indonesia, masyarakat, dan pengusaha Indonesia berkolaborasi untuk menghasilkan bantuan kemanusiaan ini. Menteri Retno turut hadir untuk melepas bantuan tersebut yang tiba di Myanmar pada tanggal 21 Januari 2017. Menteri Retno juga menekankan komitmen kuat Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan inklusif di wilayah Rakhine dan bagi masyarakat Rakhine, terutama etnis Rohingya, baik melalui kerja sama bilateral maupun melalui ASEAN. Bantuan ini diterima oleh Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Myanmar (Tirto.id 2017). Atas nama Pemerintah Myanmar, Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional dan Ekonomi dibawah Kementerian Luar

Negeri, *U Kyaw Moe Tun*, mengapresiasi dan menyambut baik bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang disampaikan melalui skema diplomatik antara kedua negara (The Republic of the Union of Myanmar Ministry of Information 2017).

Seiring dengan eskalasi serangan dan meningkatnya intensitas konflik yang dihadapi oleh etnis Rohingya di wilayah Rakhine, pemerintah Indonesia kembali memberikan bantuan. Bantuan tersebut memiliki total berat hingga 20 ton dan bernilai 2 juta US\$, yang terdiri dari 5 ton makanan siap saji, 7.000 sarung, 20 tenda pengungsi, 1 ton peralatan kesehatan dan obat-obatan, serta water purifier (Tabloid Diplomasi 2018).

Bantuan kemanusiaan dari Indonesia ini tidak hanya ditujukan sebagai bantuan jangka pendek atau respons terhadap situasi darurat, tetapi juga diharapkan dapat berfungsi sebagai bantuan jangka panjang dan melampaui bantuan kemanusiaan biasa. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan dan komprehensif kepada Myanmar, khususnya kepada etnis Rohingya. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia menekankan pada program-program pembangunan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan. Ini mencakup sektor-sektor krusial seperti bisnis dan pengembangan kapasitas SDM yang penting, seperti tenaga medis dan pendidik. Langkah ini diambil untuk mendukung bantuan jangka menengah yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang mencakup Pembangunan rumah sakit dan empat sekolah di Rakhine. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan dan komprehensif kepada Myanmar (Tempo.co 2017).

Pemerintah Indonesia memulai pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Myaung Bwe di wilayah utara Rakhine, Myanmar, pada September 2017. Area ini mencakup bangunan akomodasi untuk staf rumah sakit dan gedung utama. Diperkirakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini akan membutuhkan dana sebesar 1,8 US\$. Dana ini berasal dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Palang Merah Indonesia, berbagai Organisasi Non-Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan kontribusi dari masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk membantu Myanmar, khususnya etnis Rohingya (ReliefWeb 2017).

Selain bantuan-bantuan yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia juga membentuk badan *Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar* (AKIM). Badan ini bekerja sama dengan 11 LSM, menunjukkan upaya kolaboratif dalam menangani isu ini. Ini merupakan langkah penting dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan yang berkelanjutan dan efektif. Pemerintah dan masyarakat Indonesia bekerja sama untuk menghasilkan aliansi ini. Badan ini didirikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2017 (Maulana 2017). Tabel berikut menunjukkan 11 lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam AKIM:

Tabel 2.2 Daftar 11 LSM yang tergabung dalam AKIM

No	Nama Lembaga
1.	Muhammadiyah Disaster Management Centre
2.	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama
3.	PKPU Human Initiative

4.	Dompot Dhuafa
5.	Rumah Zakat
6.	Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid
7.	LAZIS Wahdah
8.	Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI)
9.	Aksi Cepat Tanggap
10.	Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
11.	Social Trust Fund – UIN JAKARTA

Sumber: (Dompot Dhuafa 2017)

AKIM telah mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk membantu mengatasi masalah konflik dan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Badan ini terus berupaya menyediakan layanan kemanusiaan kepada orang Rohingya yang migrasi ke Indonesia karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. AKIM meminta semua pihak untuk mengambil tindakan yang tepat dan menahan diri dari segala tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat sipil. Selain itu, mereka meminta tindakan dan strategi yang dapat mempercepat rekonsiliasi antara komunitas Rohingya dan Rakhine. AKIM meminta semua orang yang terlibat dalam proses penggalangan dana untuk menghindari menggunakan gambar korban secara berlebihan karena ini melanggar nilai kemanusiaan. "*Kemanusiaan tanpa batas, membantu dengan cinta bukan dengan kebencian*" adalah slogan dari AKIM (Dompot Dhuafa 2017).

Bekerja sama dengan AKIM, Kemlu RI telah menciptakan program yang dikenal sebagai *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO).

Program ini memberikan prioritas bantuan kepada 4 area utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemulihan. Program ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun dengan target bantuan kemanusiaan senilai US\$ 2 juta. Dana ini diperoleh dari sumbangan masyarakat Indonesia yang terkumpul melalui lembaga anggota AKIM. Menurut Menlu Retno, bantuan kemanusiaan yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia ini telah memenuhi model bantuan internasional yang partisipatif dan inklusif, sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Advisory Commission on Rakhine State* (Kementerian Luar Negeri 2017).

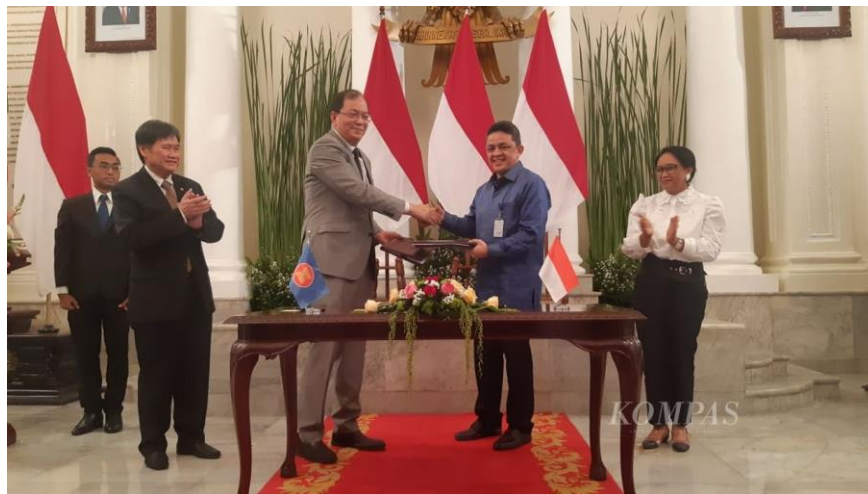
Selain itu, Menteri Retno menyatakan bahwa selama misi kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai dua hal penting. Pertama, adalah menyampaikan perhatian besar dari masyarakat Indonesia terhadap situasi krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Rakhine State. Kedua, adalah pembentukan komitmen dari pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan krisis tersebut. Pencapaian lain yang juga penting adalah partisipasi Indonesia dalam akses dan penerimaan oleh pemerintah Myanmar terhadap pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Proses penyaluran bantuan ini dipimpin oleh pemerintah Myanmar dan melibatkan partisipasi dari *International Committee of the Red Cross* (ICRC), ASEAN, dan beberapa negara lainnya. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar (Antaraneews 2017a).

Selain ke Myanmar, Indonesia juga mengirimkan bantuan kepada negara yang berbatasan dengan Myanmar sehingga banyak pengungsi yang berdatangan, yaitu Bangladesh. Para pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh terus meningkat. Pada akhirnya, hal itu meningkatkan tekanan terhadap pemerintah

Bangladesh, yang pada akhirnya meminta bantuan internasional untuk membantu menangani banyaknya pengungsi Rohingya yang tiba di Bangladesh. Dalam kasus Bangladesh, Indonesia juga berhubungan dengan pemerintah Bangladesh dalam kebijakan luar negeri karena kedua negara ini memiliki masalah yang sama dengan pengungsi Rohingya yang terus datang setelah konflik di Myanmar, yang menjadi masalah yang harus ditangani oleh kedua negara. Namun, ada perbedaan antara kedua negara: Indonesia secara umum dapat menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke negaranya. Berbeda dengan Bangladesh, yang memiliki wilayah yang kecil tetapi memiliki populasi hampir 150 juta orang. Oleh karena itu, Indonesia membantu pemerintah Bangladesh dalam memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya yang berasaskan kemanusiaan (Antarnews 2017b).

Pada tanggal 27 Januari 2018, terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali. Pertemuan tersebut membahas isu yang sangat serius terkait dengan masalah Rohingya, dan pada akhirnya Indonesia juga berusaha untuk membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh Bangladesh dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya di sana. Dengan bantuan *Aksi Cepat Tanggap (ACT)*, Indonesia juga telah membantu hampir 50.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh dengan mendistribusikan terus menerus makanan dan alat kesehatan. Distribusi dilakukan ke dua belas lokasi di kawasan pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Menurut data yang dikumpulkan pada tahun 2018, Indonesia telah mengirimkan setidaknya 54 ton bantuan kemanusiaan. Bantuan ini termasuk 30 ton beras, 14.000 selimut, 2.004 paket makanan siap saji, 20 tenda besar, 900 paket pakaian, 10 tangki air fleksibel, dan 10 ton gula pasir (Pramita and Zahidi 2023).

Hingga dengan tahun 2019, telah dilakukan dua kali upaya repatriasi, yaitu pada November 2018 dan Agustus 2019. Namun upaya repatriasi tersebut mengalami kegagalan karena para pengungsi masih mengkhawatirkan keamanan dan tidak dijamin status kependudukan jika kembali ke Myanmar. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan repatriasi, pada tahun 2019 Indonesia telah melakukan Pelaksanaan Hibah Repatriasi Pengungsi di Rakhine, Myanmar yang disalurkan melalui ASEAN hingga mencapai RP. 7,5 miliar (Leba 2019).



Gambar 2. 1 Penandatanganan Perjanjian Hibah Antara Indonesia dan ASEAN Tahun 2019

Penandatanganan perjanjian hibah yang didokumentasikan seperti pada gambar di atas, merupakan bentuk implementasi *rekomendasi Preliminary Needs Assessment (PNA)* dari *ASEAN Assessment and Response Team (ASEAN-ERAT)* sebagai bagian dari proses repatriasi pengungsi di Myanmar. Bantuan hibah tersebut juga sebagai bukti dari komitmen Indonesia pada KTT ASEAN ke-35 yang dilaksanakan tanggal 2 November 2019 dan disampaikan oleh Presiden Joko

Widodo. Bahkan dipaparkan oleh Menlu Indonesia, Retno Marsudi bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang berkontribusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya melalui ASEAN (Kemlu 2019).

2.2 Aktor-Aktor yang Terlibat

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM dan perdamaian, telah berperan aktif dalam membantu penyelesaian masalah Rohingya. Namun, Indonesia tidak sendirian dalam upaya ini, melainkan dibantu oleh beberapa aktor lain yang memiliki keterlibatan dalam masalah Rohingya. Beberapa aktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

2.2.1 ASEAN (Association of South-East Asian Nations)

Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, ASEAN memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya di Myanmar. Dan salah satu wujud komunitas ASEAN di bidang politik keamanan adalah penanganan pengungsi. Untuk menangani bencana yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, ASEAN membentuk lembaga mitigasi bencana yang disebut Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (*AHA Centre*). Lembaga ini berfokus pada upaya untuk menangani bencana, baik alam maupun non-alam. Satuan tugas ini akan berkonsultasi dan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN untuk membantu memudahkan pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar (Bangun 2018).

Dalam menilai kesiapan Myanmar untuk menerima kembalinya pengungsi Rohingya, tim dari AHA Centre berkunjung ke Rakhine pada Maret 2019.

Kunjungan tersebut menghasilkan 4 rekomendasi kepada pemerintah Myanmar untuk mencegah konflik horizontal di Myanmar: jaminan keselamatan pribadi, keamanan materi, pendaftaran Rohingya, dan kohesi sosial. Namun, sebagian besar pengungsi menolak untuk kembali dengan sukarela karena faktor keamanan yang tidak jelas, seperti halnya dampak konflik dan kekerasan pada umumnya (BBC 2017).

2.2.2 *Perserikatan Bangsa-Bangsa*

Dalam isu Rohingya, tim PBB telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya yang berada di Myanmar ataupun Bangladesh. Bantuan kemanusiaan ini diberikan oleh *Deputy Commissioner* (DC) di tingkat wilayah dan *Commissioner for Refugee Relief and Repatriation* (RRRC), yang dipimpin oleh *Senior Koordinator for Emergency Response*, dan mencakup bantuan psikologis serta perencanaan strategis yang disusun dalam *Joint Response Plan* (JRP). Tujuan dari JRP ini adalah mendukung pemerintah Myanmar untuk memastikan bahwa kehidupan, martabat, kesejahteraan dan hak – hak setiap orang yang terkena dampak konflik, bencana alam dan keadaan darurat dapat dilindungi. Tim Kemanusiaan PBB menyetujui tujuan aksi kemanusiaan ini untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang terlantar dan mendorong pemerintah untuk mencapai solusi yang maksimal, memastikan bahwa setiap orang yang rentan terkena dampak krisis kemanusiaan memiliki akses ke layanan penting, memastikan bahwa warga sipil dilindungi, dan meningkatkan kapasitas nasional dan ketahanan masyarakat (Wijaya 2019).

Bantuan PBB melalui program JRP pada tahun 2018 terdiri dalam beberapa sektor yaitu makanan, kesehatan, dan tempat perlindungan. Dalam sektor makanan, PBB memastikan bahwa semua pengungsi Rohingya mendapatkan pasokan makanan yang adil, aman, merata, dan bergizi agar meningkatkan ketahanan masyarakat yang terkena dampak konflik. Program ini dilaksanakan oleh *The Food Security Sector* (Rohingya Response 2018).

Dalam sektor kesehatan, pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh menghadapi kondisi kesehatan yang buruk karena populasi yang padat dan kurang gizi. Kekurangan makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang tidak layak juga menyebabkan penyakit ini muncul. Selain kekurangan kebutuhan hidup, mereka yang telah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan mental tidak memiliki akses ke perawatan medis yang memadai, terutama bagi wanita hamil, yang diperkirakan mencapai 60.000 jiwa. Untuk membantu pengungsi Rohingya pulih, *Directorate General of Health Services* di Dhaka mendirikan sektor kesehatan Akibat dampak krisis kemanusiaan, sektor ini memberikan fasilitas kepada setiap 20.000 pengungsi untuk mendapatkan layanan kesehatan 24 jam penuh dengan rawat inap, laboratorium, dan tambahan tiga pos layanan kesehatan yang memberikan perawatan dasar sehari-hari. Sektor ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi anak-anak (Wijaya 2019).

Di sektor terakhir yaitu tempat perlindungan, pemukiman pengungsi Rohingya yang dibangun sebagai tempat perlindungan sementara tidak memenuhi standar kemanusiaan. Pengungsi lain membangun tempat perlindungan di daerah perbukitan yang beresiko longsor dan rawan banjir karena lahan yang sudah penuh sesak dan tidak memadai. Sebagai pemimpin sektor tempat perlindungan ini, *The*

Refugee Relief and Repatriation Commissioner terus memeriksa kemajuan pembangunan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya untuk meningkatkan dan mencapai tujuan yang paling efektif. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi para pengungsi yang terkena dampak konflik atau bencana alam, meningkatkan kondisi kehidupan mereka, memberikan pemulihan psikologis, meningkatkan perlindungan, martabat, dan keselamatan mereka, dan meningkatkan ketahanan masyarakat (Teresia, Kurnianto, and Iqbal 2017).

2.2.3 *International Committee of The Red Cross (Komite Internasional Palang Merah)*

ICRC atau Komite Internasional Palang Merah merupakan sebuah wadah dalam menanggulangi korban-korban yang berjatuh dalam konflik bersenjata dan kemanusiaan, ICRC bersifat independen, netral dan imparial. ICRC akan selalu hadir selama manusia masih memilih jalan bersenjata untuk menyelesaikan sebuah masalah di antara mereka. ICRC merupakan pemegang mandat hukum humaniter internasional yang akan berusaha mencegah penderitaan para korban dalam sebuah konflik bersenjata dan kemanusiaan, dan ICRC selalu mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Untuk mempermudah membantu korban-korban kemanusiaan di negara bagian Rakhine, ICRC bekerja sama dengan Palang Merah Myanmar. Pada 2017, ICRC telah membantu keluarga yang berada di Rakhine yang berada di bawah kontrol pemerintah bersenjata, dengan meningkatkan kegiatan mata pencaharian mereka, dibantu dengan memberikan benih, alat, dan hibah uang tunai serta pelatihan oleh ICRC. Berdasarkan rekomendasi dari ICRC, penjara

menambahkan teknisi baru untuk meningkatkan kenyamanan dalam penjara. Selanjutnya peningkatan meningkat pada tahun tersebut, karena banyak ancaman dan kerusuhan, sehingga program bantuan dari ICRC banyak yang tertunda (Bilhaqqi 2018).

Selain itu ICRC berusaha merawat para pengungsi internal, akibat serangan yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar sebagai serangan balasan yang sebelumnya dilakukan oleh *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)*. ICRC bekerja sama dengan UNHCR untuk membantu para refugees atau pengungsi yang melewati lintas batas Myanmar, ICRC membantu lewat logistik dan pembuatan administrasi bila dibutuhkan. Setidaknya dari Agustus 2017 hingga Juni 2018, ICRC telah memberikan bantuan kemanusiaan; makanan kepada 280.000 orang, 216.000 keluarga mendapatkan sembako dan keperluan sehari-hari (peralatan kesehatan, raket nyamuk, selimut, kain terpal, oralit, dan lainnya). 800.000 liter air didistribusikan oleh ICRC ke komunitas-komunitas yang membutuhkan di Myanmar, terutama pengungsi internal di wilayah Rakhine. 13.200 orang mendapatkan hibah dana untuk memperbaiki perekonomiannya, dengan dana hibah dijadikan modal untuk mereka mandiri kembali, dan 10.000 orang mendapatkan pelayanan sanitasi yang bersih dan sehat (Bilhaqqi 2018).

2.2.4 *Organisasi Kerjasama Islam*

OKI mengadakan beberapa pertemuan tingkat tinggi dan regional, seperti Konferensi Luar Biasa Menteri Luar Negeri OKI di Dhaka, Bangladesh pada Januari 2018, dan mengeluarkan resolusi-resolusi yang menyerukan perlindungan hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan kembalinya etnis Rohingya

ke Myanmar. Pertemuan-pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 40 negara anggota OKI. Resolusi-resolusi ini mengutuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, dan mendesak penyelidikan independen oleh PBB atau OKI. Resolusi-resolusi ini juga menuntut pengakuan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar, dan menjamin hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan beragama. Resolusi-resolusi ini juga mendukung proses repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar, dengan pengawasan internasional (Sinaga 2018).

OKI juga mengirimkan delegasi OKI-IPHRC (Komisi Hak Asasi Manusia Independen OKI) ke Cox's Bazar, Bangladesh pada Maret 2018, untuk mengamati kondisi langsung pengungsi Rohingya dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada OKI dan komunitas internasional. Delegasi ini terdiri dari tujuh negara anggota OKI. Delegasi ini bertemu dengan pemerintah Bangladesh, lembaga-lembaga PBB, organisasi-organisasi kemanusiaan, dan perwakilan pengungsi Rohingya. Delegasi ini menyaksikan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh pengungsi Rohingya, seperti luka-luka, trauma, kelaparan, penyakit, dan kekurangan fasilitas. Delegasi ini juga mendengar kesaksian mengerikan dari pengungsi Rohingya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, dan pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Delegasi ini mengeluarkan laporan yang berisi analisis, temuan, dan rekomendasi terkait dengan konflik Rohingya, yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal OKI, Dewan Menteri Luar Negeri OKI, dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (Jordy Adam 2019).

2.2.5 *Bangladesh*

Etnis Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak tahun 1992. Dari tahun ke tahun jumlah pengungsi yang masuk ke Bangladesh terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan sebuah lembaga yang bernama MSF (*Medecins Sans Frontieres*), yang beranggotakan para Aktivis Kemanusiaan Dokter Lintas Batas menyatakan bahwa pada tahun 2017 sekitar 770.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Pada awalnya, pemerintah Bangladesh mempertimbangkan hanya untuk memberikan bantuan sementara karena menunggu kebijakan dari Myanmar untuk menerima kembali etnis Rohingya. Namun sayangnya kebijakan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Myanmar karena mereka tidak mengakui etnis Rohingya (Tempo.co 2023).

2.3 Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya

HAM adalah hak alami yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun, orang Rohingya sebenarnya tidak memiliki hak-hak yang disebutkan di atas di Myanmar. Pemerintah Myanmar memperlakukan mereka dengan tidak adil, membatasi hak-hak mereka, termasuk hak untuk hidup. Pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya adalah salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Karena diskriminasi dan pencabutan kewarganegaraan, etnis Rohingya akhirnya menjadi warga negara tanpa status. Myanmar menghapus Rohingya dari 135 kelompok etnis, termasuk Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, dan Shan.

Pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan operasi militer di Desa Gu Dar Pyin, Negara Bagian Rakhine. Operasi ini menyebabkan serangkaian

pembantaian dan ratusan ribu rumah Muslim Rohingya di Myanmar dibakar. Meskipun militer Myanmar menyatakan bahwa hanya 19 "teroris" yang tewas dalam operasi tersebut, data dari penelitian badan hak asasi manusia menunjukkan informasi yang berbeda. Pembantaian Agustus 2017 tersebut menewaskan ratusan warga sipil. Human Rights Watch juga memaparkan hal serupa dalam laporannya yang menyebutkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan berskala besar di Desa Rakhine. Pembantaian besar-besaran terhadap orang Rohingya melibatkan ratusan aparat militer dan polisi dengan senjata lengkap. Pengawas hak asasi manusia global mengutip "Laporan Misi Pencari Fakta PBB" yang memaparkan secara tragis praktik kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para perempuan Rohingya. Dalam laporan ini, pengawas hak asasi manusia mengatakan bahwa perempuan Rohingya diculik, kemudian diperkosa dalam kompleks militer (Siba & Qomari'ah, 2018).

Pemerintah Myanmar juga menerapkan kebijakan Burmanisasi, yang jelas-jelas menunjukkan tindakan diskriminasi. Kebijakan ini mengakibatkan pengakuan hanya terhadap agama Buddha di Myanmar. Tetapi dalam kenyataannya, ada agama lain yang menetap di Myanmar termasuk Islam (etnis Rohingya). Terlepas dari fakta bahwa orang Rohingya tidak boleh memiliki lebih dari dua anak, mereka yang berasal dari etnis Rohingya tidak akan diizinkan untuk terlibat dalam peran politik Myanmar, seperti menteri, sekretaris parlemen, dan beberapa posisi lainnya. Semua institusi pendidikan Islam yang telah ada sebelumnya dihapus. Kebijakan ini menghapus status kewarganegaraan Rohingya dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok etnis Rohingya. Oleh karena itu, kelompok Rohingya mencari

keamanan dengan mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh. Berikut terdapat jumlah pengungsi Rohingya tahun 2017-2019:

Tabel 2.3 Jumlah Pengungsi Rohingya 2017-2019 di Bangladesh

Tahun	Jumlah Pengungsi Rohingya di Bangladesh
2017-2018	901.185
2019	1,6 juta (sekitar 1,4 juta terdaftar)

Sumber: Olahan Penulis dari Sumber Referensi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengungsi Rohingya dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017-2018, jumlah pengungsi terdiri dari wanita, orang lanjut usia, dan anak-anak. Lebih dari 50% total jumlah pengungsi tersebut, atau sekitar 400.000 merupakan anak-anak yang berusia dibawah 12 tahun. Perjalanan yang mereka tempuh menuju Bangladesh sangatlah panjang dan penuh risiko. Namun, di tengah semua kesulitan tersebut, harapan anak-anak Rohingya untuk masa depan yang lebih baik dan terjamin tetap menguat. Kemudian, pada tahun 2019 jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapai 1,6 juta menetap di Cox's Bazar, Bangladesh (UNHCR 2019). Namun sebagian warga Rohingya tetap memilih untuk menetap di Rakhine, meskipun keadaan mereka sering terancam dan tidak diakui. Mereka beralasan bahwa disana merupakan tempat asal mereka dan telah tinggal di sana selama bertahun-tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa diskriminasi yang dilakukan terhadap Rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Oleh sebab

itu, pelanggaran HAM ini masuk ke dalam tindakan genosida. Menurut Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948, genosida adalah tindakan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya termasuk dalam kategori kejahatan genosida. Mengeluarkan kebijakan burmanisasi menunjukkan bahwa genosida yang dilakukan telah direncanakan secara sistematis. Dari kebijakan tersebut terjadi tindakan pembunuhan dan pemusnahan terhadap etnis Rohingya agar Rohingya tidak lagi berada di Myanmar yang bertujuan agar etnis tersebut dimusnahkan atau keluar dari Myanmar.

BAB 3

UPAYA DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA TERHADAP

KONFLIK ROHINGYA

3.1 Indonesia Melakukan Negosiasi Akses terhadap Etnis Rohingya yang Membutuhkan Bantuan dan Perlindungan

Aktor kemanusiaan berusaha menegosiasikan kepada pemangku kepentingan seperti pihak-pihak yang berkonflik, pemerintah setempat atau organisasi internasional, untuk mendapatkan akses kepada penduduk sipil dalam memberikan bantuan dan perlindungan. Pada aspek negosiasi, dipahami bahwa aktor kemanusiaan berusaha bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjangkau warga sipil dan memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga sipil tersebut. Terkait proses diplomasi kemanusiaan, Indonesia merupakan negara yang melakukan negosiasi, komunikasi dan membangun hubungan baik dalam upaya penyelesaian konflik etnis Rohingya yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Indonesia sebelumnya menjalin hubungan ini dengan tujuan sebagai akses untuk Indonesia agar lebih mudah dalam mengidentifikasi krisis dan menangani konflik Rohingya (Indah Mustika Permata, D, and Sinulingga 2019).

Sejak awal krisis, Indonesia telah aktif dalam upaya penyelesaian dan penanganan kemanusiaan. Dengan basis diplomasi yang kuat dan kehadiran yang berpengaruh di organisasi regional seperti ASEAN, Indonesia telah berusaha menegosiasikan akses bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya di Myanmar. Bentuk hubungan baik tersebut merupakan investasi bagi Indonesia untuk mendukung proses diplomasi kemanusiaan. Tidak hanya melakukan negosiasi

dengan pemerintah Myanmar, Indonesia juga melakukan negosiasi dengan pihak lain yaitu Bangladesh, demi mencari solusi terbaik terkait penyelesaian konflik etnis Rohingya di Myanmar (Sadewa, Heryadi, and Hidayat 2019).

Karena mayoritas penduduknya adalah muslim, masyarakat Indonesia banyak melakukan aksi damai untuk membantu dalam konflik yang menyangkut umat Islam. Contohnya adalah konflik yang terjadi di Myanmar dan Palestina. Masyarakat mendesak pemerintah Indonesia untuk mencari solusi terbaik. Oleh karena itu, dalam konteks konflik Rohingya pemerintah Indonesia mencoba mendorong pemerintah Myanmar untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik Myanmar dengan menggunakan alasan kemanusiaan. Solusi yang diberikan Indonesia berupa formula 4+1 yang terdiri dari empat poin utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal tanpa menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang tinggal di Rakhine State tanpa memandang suku atau agama, dan pentingnya segera membuka akses ke bantuan kemanusiaan.

Satu elemen terakhir adalah perlunya menerapkan rekomendasi dari Laporan Dewan Penasehat Rohingya yang dipimpin oleh Kofi Annan. Salah satu rekomendasi penting komisi itu adalah soal isu kewarganegaraan, yang dinilai sebagai hambatan utama mencapai perdamaian di Rakhine. Laporan itu menyatakan bahwa jika isu ini tidak segera ditangani, isu ini akan tetap menjadi penyebab signifikan terjadinya penderitaan kemanusiaan dan ketidakamanan, yang tentunya akan mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh Myanmar. Komisi itu menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk menetapkan strategi dan jangka waktu bagi proses verifikasi kewarganegaraan dan menjelaskan apakah

penetapan itu sesuai dengan standar internasional. Secara khusus Komisi Penasehat Rakhine merekomendasikan revisi UU Hak Warga Negara Tahun 1982 di Myanmar karena klasifikasi kewarganegaraan dalam aturan hukum itu sangat rumit dan kerap dikaitkan dengan etnis tertentu (Mazrieva 2017).

Namun demikian, upaya tersebut menghadapi kendala dan tidak berjalan mulus. Ini adalah tantangan karena Myanmar memiliki mekanisme yang mengikuti aturan yang disepakati oleh anggota ASEAN yaitu prinsip *ASEAN Way*, yang menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus menghormati kedaulatan satu sama lain dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN lainnya, pemerintah Indonesia tidak dapat pergi terlalu jauh untuk ikut campur dalam masalah negara tetangganya. Selain itu, ada hambatan yang datang dari Myanmar sendiri, yang sering menutup diri ketika pihak dari luar ingin memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rohingya. Mereka memiliki aturan bahwa bantuan hanya boleh diberikan dengan izin pemerintah Myanmar. Bahkan Myanmar pernah menolak organisasi seperti PBB karena alasan keamanannya yang belum stabil (Bangun 2018).

Karena itu, Indonesia harus mencari cara alternatif untuk memungkinkan dirinya untuk bisa membuka akses Myanmar. Akhirnya Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar yang menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah Indonesia diperbolehkan untuk memberikan bantuan dengan syarat harus bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Myanmar. Oleh karena itu akhirnya terbentuklah AKIM (Maulana 2017). Penjelasan mengenai bagaimana pembentukan AKIM telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Akhirnya, Indonesia berhasil membuka pintu bagi Myanmar untuk menerima bantuan kemanusiaan dari luar melalui kehadiran aktor non-negara. Dalam diplomasi kemanusiaan, pihak yang terlibat bukan hanya negara tetapi juga aktor non-negara. Aktor ini berusaha untuk membantu dan memudahkan upaya penyelesaian konflik dengan meningkatkan komunikasi dan kerja sama, Strategi ini merupakan bentuk implementasi dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Laporan Dewan Penasehat Rohingya yang dipimpin oleh Kofi Annan, yang mengatakan bahwa model bantuan terhadap isu-isu kemanusiaan harus bersifat partisipatif dan inklusif (Kementerian Luar Negeri 2017).

Selain itu, pemerintah Indonesia dan Bangladesh juga melakukan negosiasi terkait akses bantuan kemanusiaan. Negosiasi dengan Bangladesh tidak sesulit negosiasi dengan Myanmar. Karena terlalu banyak pengungsi Rohingya yang membuat Bangladesh menghadapi kesulitan, sehingga Bangladesh benar-benar membutuhkan bantuan dari pihak luar atau internasional untuk membantu pengungsi yang tinggal di negaranya. Akhirnya, pertemuan tersebut mencapai konsensus bahwa Bangladesh bersedia melindungi Rohingya dan memungkinkan pihak luar mengirimkan bantuan kemanusiaan. Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM, yang berada di Bangladesh, selama penyediaan bantuan kemanusiaan (Suwandari and Sugito 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, demi mencapai akses untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada etnis Rohingya, Indonesia terus berupaya untuk melakukan negosiasi, melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Selain untuk mengimplementasikan diplomasi kemanusiaan, upaya ini juga dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai ancaman keamanan di

kawasan Asia Tenggara, sekaligus mendorong kerjasama yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Proses negosiasi yang dilakukan Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019 mendapat apresiasi dari Pemerintah Myanmar. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah sesuai mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah Myanmar. Kepercayaan pemerintah Myanmar dan langkah-langkah strategis yang diambil melalui gabungan kekuatan banyak pihak menjadi kunci keberhasilan diplomasi kemanusiaan.

3.2 Diplomasi Indonesia dalam Melakukan Monitoring Bantuan

Pada aspek monitoring dimaksudkan adalah melakukan pemantauan terhadap bantuan-bantuan ataupun program yang telah diberikan terkait diplomasi kemanusiaan dengan tujuan memastikan bahwa bantuan tersebut berjalan dan mencapai sasaran dengan tepat. Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai langkah dan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas bantuan yang diberikan kepada etnis Rohingya. Salah satu pendekatan utama adalah melalui kerjasama intensif dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh. Kunjungan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi ke kedua negara tersebut membantu membentuk dialog langsung dengan pemimpin setempat. Pertemuan ini tidak hanya membahas jenis bantuan yang diperlukan, tetapi juga memfokuskan pada distribusi dan pemantauan pelaksanaan bantuan di lapangan. Dalam konteks ini, komunikasi intensif menjadi landasan bagi pemantauan dan evaluasi bantuan yang diberikan.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada etnis Rohingnya adalah bantuan yang diberikan melalui mekanisme kerangka kerja sama antara pemerintah dan pemerintah (Indonesia dan Myanmar), sehingga pendistribusian

bantuan tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar. Tujuannya adalah agar pemerintah Myanmar bersedia untuk menerima kehadiran Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Oleh karena itu, atas semua bantuan yang telah diberikan, Indonesia melakukan pemantauan dengan mekanisme pemerintah dan pemerintah.

3.2.1 Kategori Bantuan Materiil

Terkait monitoring terhadap bantuan materiil Indonesia kepada etnis Rohingya di Myanmar, seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Myaung Bwe, wilayah utara Rakhine, Myanmar, Indonesia aktif melakukan pemantauan atau monitoring sejak awal pembangunan rumah sakit tersebut. Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan rumah sakit menghabiskan dana sekitar 1.8 juta dolar AS. Biaya tersebut didapatkan melalui hasil dari kerja sama pemerintah Indonesia dengan masyarakat Indonesia termasuk PMI, LSM, dan sektor swasta. Pemantauan telah dilakukan sejak pembangunan untuk pemetaan dan konstruksi pagar pada September tahun 2017 dan berlanjut saat peletakan batu pertama yang menandakan dimulainya pembangunan tahap kedua untuk pembangunan akomodasi staf medis, serta tahap ketiga pembangunan yaitu untuk gedung utama (Kompas 2017).

Monitoring dilakukan langsung oleh Duta Besar RI untuk Myanmar Ito Sumardi dan Menteri Urusan Rakhine, perwakilan Menteri Kesehatan Myanmar, perwakilan MER-C, tokoh masyarakat setempat serta komunitas agama Budha dan Islam. Dalam proses pembangunannya, selain melibatkan pemerintah Indonesia

dan pemerintah Myanmar pada monitoring, tetapi juga melibatkan tenaga kerja kerja kontraktor dan bahan-bahan material dari daerah di sekitar Myanmar dengan tujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi masyarakat lokal dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap rumah sakit. Setelah kurang lebih selama 2 tahun pembangunan, Rumah Sakit bantuan Indonesia resmi diserahkan kepada pemerintah Myanmar pada 10 Desember 2019. Kementerian Kesehatan Myanmar merupakan perwakilan yang menerima rumah sakit tersebut. Myanmar mengklaim Rumah Sakit Bantuan Indonesia menjadi model di Rakhine dalam hal pelayanan dan manajemen medis. Rumah Sakit tersebut terdiri dari bangunan utama seluas 2.214 meter persegi dengan luas tanah 4.644 meter persegi. Gedung tersebut berisi ruang-ruang utama di rumah sakit seperti ruang operasi, ruang gawat darurat, dan ruang rontgen (X-ray) (CNN Indonesia 2019).

Kemudian, untuk bantuan materiil melalui program *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) senilai 2 juta dolar AS. Bantuan tersebut disalurkan dalam program-program sosial selama dua tahun melalui empat fokus utama (prioritas), yaitu pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas, serta pemulihan pasca konflik. Terdapat 11 lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) anggota AKIM yang ikut tergabung dalam bantuan kemanusiaan ini. Dalam proses implementasi tersebut, pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar aktif dalam memberikan monitoring dan pemantauan agar bantuan yang diberikan tepat kepada sasaran yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan sejalan dengan arahan pemerintah Myanmar dalam hal *list* bantuan yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan merupakan barang, tindakan, maupun upaya yang dibutuhkan oleh etnis Rohingya. Bantuan yang dilakukan bersama negara lainnya,

seperti Bangladesh juga dilakukan pemantauan agar bantuan dipersiapkan secara hati-hati, dan terus berkomunikasi dengan pemerintah Bangladesh, serta dengan organisasi-organisasi di lapangan. Indonesia juga mempunyai *Tim Advance* yang telah berada Bangladesh untuk persiapan pendaratan pesawat yang berisi bantuan kepada etnis Rohingya. Dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh Menlu Retno Marsudi bahwa yang paling dibutuhkan bagi etnis Rohingya adalah beras, selimut, pakaian, lalu alat-alat kebersihan, misalnya sabun, sampo, lalu pakaian anak, dan sebagainya (Humas Setkab 2017). Dimana Indonesia bersama aktor-aktor yang terlibat mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan atau monitoring terkait bantuan yang diberikan.

3.2.2 *Kategori Bantuan Non-Materiil*

Pada monitoring bantuan non-materiil, Indonesia melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai lembaga organisasi, seperti Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) sebagai salah satu bentuk aktor non-negara yang mencakup 11 lembaga (Inda Mustika Permata, D, and Sinulingga 2019). Kemudian, Indonesia juga bekerja sama dengan banyak organisasi internasional mengenai konflik etnis Rohingya, seperti dengan satuan tugas ad hoc yang bertugas untuk memantau etnis Rohingya yang dikenal dengan tim monitoring ASEAN, dimana tim tersebut bersama Indonesia bersama-sama melakukan pemantauan atas kondisi etnis Rohingya di Myanmar, dan melakukan kegiatan pengawasan terhadap bantuan yang telah diberikan.

Selanjutnya oleh PBB, dimana adanya pemantauan independen yang dilakukan oleh Dewan yang menangani situasi negara tertentu atau mengenai isu-

isu tematis di seluruh belahan dunia. Pemantauan tersebut dikenal dengan *UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* (Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB tentang Myanmar. Misi pencari fakta PBB inilah yang kemudian melakukan pemantauan tuntut mengungkap fakta dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Myanmar (termasuk pasukan militer dan keamanan) terhadap etnis Rohingya (The International Development Committee 2020). Hasil dari pemantauan tersebut menjadi pertimbangan atas rekomendasi kepada PBB, komunitas internasional, dan pemerintah Myanmar terkait bantuan dan penanganan etnis Rohongya.

Indonesia juga bersama *International Committee of the Red Cross (ICRC)* melakukan monitoring terhadap isu kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Dimana hal tersebut sesuai dengan fungsi ICRC yaitu pemantauan, penilaian ulang secara terus-menerus terhadap aturan-aturan kemanusiaan untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut disesuaikan dengan realitas situasi konflik, dan mempersiapkan adaptasi dan pengembangannya bila diperlukan (Sandoz, n.d.).

Kemudian Indonesia juga bersama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang juga memberikan bantuan melalui *output* laporan kondisi etnis Rohingnya untuk mendapatkan rekomendasi dari lembaga-lembaga dan organisasi terkait solusi serta penanganan konflik etnis Rohingya di Myanmar. Untuk mendapatkan isi laporan tersebut, OKI menggunakan pendekatan diplomasi bersama organisasi internasional lainnya seperti PBB dengan membentuk kelompok pencari fakta untuk mengumpulkan informasi faktual mengenai akar krisis etnis Rohingya di Myanmar. Kelompok pencari fakta tersebut di kenal dengan *Organization of Islamic Cooperation (OIC) Contact Group on Myanmar*, melakukan pengawasan

dan monitoring terhadap kondisi dan situasi langsung etnis Rohingya di Myanmar, dimana informasi tersebut akan menjadi materi/bahan di dalam laporan OKI. Kelompok pencari fakta tersebut terdiri dari pejabat setingkat menteri dari negara-negara anggota OKI, kemudian OKI juga berkoordinasi dengan perwakilan anggota ASEAN yang juga anggota OKI yaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. Kelompok ini bertugas memantau dan mengawasi etnis Rohingya seiring mencari cara dan mekanisme untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar dan memulihkan hak kewarganegaraan mereka (Jati 2017).

Pada implementasinya, monitoring yang dilakukan oleh Indonesia terkait bantuan non-materiil kepada etnis Rohingya adalah dengan ikut aktif dalam forum-forum untuk mengangkat isu etnis Rohingya di Myanmar bersama lembaga maupun organisasi nasional, regional, dan internasional untuk menemukan solusi dan penanganan terhadap konflik tersebut. Dengan melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi, Indonesia melakukan diskusi dengan selalu memonitoring kondisi etnis Rohingnya, tujuannya adalah dengan kondisi yang diketahui tersebut, bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh etnis Rohingnya di Myanmar.

3.3 Diplomasi Indonesia dalam Melakukan Advokasi Untuk Tujuan Kemanusiaan

Pada aspek advokasi diplomasi kemanusiaan yang dimaksud adalah mengenai advokasi di berbagai level dalam mendukung tujuan kemanusiaan yaitu perlindungan hak-hak etnis Rohingya dan penyelesaian damai konflik. Melalui

advokasi diplomasi kemanusiaan, Indonesia berperan sebagai negara yang peduli terhadap perdamaian regional. Advokasi di berbagai level dilakukan Indonesia dalam mendukung kehidupan kemanusiaan yang damai (Srikandini 2017).

Keikutsertaan Indonesia melalui diplomasi kemanusiaan di Myanmar mampu memperkuat citra Indonesia sebagai penyeimbang dan mediator perdamaian, seperti di kawasan Asia Tenggara. Dengan kehadiran Indonesia di Myanmar, dapat menjadi rekam jejak yang baik bagi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang damai di Asia Tenggara. Advokasi oleh Indonesia melalui diplomasi kemanusiaan dengan cara melakukan dialog dan negosiasi dapat dilihat capaiannya dari minimnya pembahasan mengenai krisis kemanusiaan Rohingya hingga penunjukan dan keberhasilan kepemimpinan dalam mengendalikan isu Rohingya di tingkat ASEAN. Indonesia yang bertindak sebagai mediator dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai mitra dan penghubung antara organisasi regional dan internasional dan Myanmar untuk mengembangkan kebijakan konstruktif guna mengatasi krisis kemanusiaan dan Rohingya.

Indonesia telah melakukan segala upaya di tingkat ASEAN untuk peka terhadap isu tersebut dan terus berdiskusi dengan negara-negara di kawasan tersebut mengenai krisis kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya. ASEAN menilai negara-negara anggota ASEAN perlu membahas secara terbuka permasalahan demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar yang sebelumnya dianggap tabu jika dibahas dalam forum resmi maupun tidak resmi (Purnama, Dermawan, and Akmaluddin 2019).

Selain ASEAN, Indonesia juga melakukan advokasi di forum internasional lainnya seperti OKI dan PBB. Pada tanggal 10 September 2017, diadakan KTT OKI

di Kazakhstan. Pada kesempatan ini, Indonesia mendorong negara-negara anggota OKI lainnya untuk melakukan tindakan nyata dalam membantu menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya. Tindakan nyata ini diharapkan melibatkan penyediaan bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada Indonesia untuk meminta pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya, yang akan menghasilkan pemerataan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Setelah itu, Indonesia dan OKI membawa masalah ini ke Sidang Umum PBB yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 (Lestari 2017). Atas permintaan Indonesia dan OKI, PBB membicarakan krisis pengungsi Rohingya yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di Rakhine pada bulan Agustus 2017. Akhirnya, pada Sidang Umum Lanjutan tanggal 24 Desember 2017, PBB meminta Myanmar menghentikan operasi militernya terhadap Rohingya.

Setelah itu, Indonesia terus melakukan advokasi di forum OKI. Indonesia mendorong OKI untuk terus melakukan upaya nyata untuk menyelesaikan konflik Rohingya pada KTT Keempat yang berlangsung di Mekah pada tahun 2019. Indonesia mendorong OKI untuk segera mengambil langkah-langkah terhadap konflik Rohingya. Hasilnya, OKI mulai mengambil sikap dan mulai memainkan peran signifikan dalam penyelesaian konflik tersebut, termasuk dengan mendorong negara-negara anggotanya untuk terlibat dalam diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Selain itu, OKI juga memberikan dukungan finansial untuk mendukung proses demokratisasi di Myanmar. Pada pertengahan tahun 2018, fokus kebijakan Indonesia kepada Rohingya adalah melakukan advokasi melalui dialog dengan komunitas internasional dan mengirimkan bantuan ke kamp-kamp disekitar Bangladesh (IPAC 2018).

Dipahami bahwa dari tahun 2017 hingga dengan 2019, kebijakan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar sebagian besar memang berfokus pada diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia melalui aspek advokasi ini membawa hasil konstruktif pada lebih terbukanya Myanmar terhadap dukungan dari negara lain, organisasi, dan dunia internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya, bahkan lebih luas lagi dengan mendukung demokrasi di Myanmar (Setiawan and Suryanti 2021b).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik Rohingya telah berlangsung sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948, dan terus berkembang karena pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara, sehingga menghambat akses mereka terhadap pendidikan, perawatan medis, dan kesempatan kerja yang layak. Konflik ini telah menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pengungsian, persekusi, dan bahkan kematian. Sebagai hasilnya, banyak orang Rohingya memilih untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara tetangga terdekat, termasuk Bangladesh.

Pemerintah Indonesia, sebagai negara tetangga dan anggota ASEAN, memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik ini. Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk salah satunya melalui diplomasi kemanusiaan, untuk membantu mengatasi krisis Rohingya. Ini termasuk upaya menegosiasikan akses bagi etnis Rohingya yang membutuhkan bantuan dan perlindungan, memberikan dan memantau bantuan program, serta melakukan advokasi di berbagai forum internasional seperti PBB dan OKI.

Pada aspek negosiasi akses, Indonesia berusaha untuk melakukan negosiasi dengan melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan masyarakat internasional untuk mengangkat konflik kemanusiaan di Myanmar. Indonesia juga aktif dalam mengusulkan solusi politik komprehensif, seperti melalui proposal formula 4+1 untuk etnis Rohingya di masa depan. Pada aspek memberikan dan memantau bantuan, Indonesia terlibat dalam monitoring dan evaluasi program bantuan terkait

diplomasi kemanusiaan untuk etnis Rohingya, baik dengan melibatkan pemerintah Myanmar dan Bangladesh, maupun melalui partisipasi aktif dalam misi kemanusiaan.

Terakhir, Indonesia telah berperan aktif melalui diplomasi kemanusiaan dengan fokus pada advokasi di berbagai level. Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendukung perlindungan hak-hak etnis Rohingya dan penyelesaian damai konflik dengan melakukan advokasi di tingkat regional, terutama melalui ASEAN, serta di forum internasional seperti OKI dan PBB. Melalui upaya ini, Indonesia menunjukkan perannya dalam memastikan pengakuan internasional terhadap isu kemanusiaan ini, dan berkomitmen untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi etnis Rohingya.

Berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa diplomasi kemanusiaan cukup efektif dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan seperti krisis Rohingya. Diplomasi yang tidak mengintervensi urusan pihak yang berkonflik dan menghindari kekerasan dapat membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Meskipun beberapa upaya belum sepenuhnya maksimal, karena upaya repatriasi gagal dilakukan. Para pengungsi menolak untuk kembali karena mereka khawatir akan masalah keamanan dan tidak ada jaminan status kependudukan jika kembali.

Meskipun langkah-langkah diplomasi kemanusiaan yang diambil oleh Indonesia telah memberikan dampak positif, namun tidak bisa dipungkiri bahwa konflik ini tidak mudah diselesaikan dengan waktu singkat. PBB saja telah mengakui bahwa konflik ini merupakan *the most persecuted minority*, yang berarti

merupakan salah satu konflik yang mematikan dan masif. Hal ini terbukti sejak konflik ini terjadi sampai dengan sekarang belum terselesaikan dengan tuntas.

4.2 Rekomendasi

Tentunya penelitian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan karena terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya melakukan penelitian terkait diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia dari 2020 hingga seterusnya, khususnya pada era pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, Engy. 2017. "The History of the Persecution of Myanmar's Rohingya." <https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040>.
- Albayumi, Fuat, Nourma Meysita Hadi, and Djoko Susilo. 2018. "Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017." *Nation State: Journal of International Studies* 1 (1).
- Alunaza, Hardi, and M Kholit Juani. 2017. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2012-2015." *Indonesian Perspective* 2 (1): 1–17.
- AntaraneWS. 2017a. "Formula 4+1 Dari Indonesia Untuk Myanmar Demi Atasi Krisis Rohingya." <https://www.antaraneWS.com/berita/650665/formula-4-1-dari-indonesia-untuk-myanmar-demi-atasi-krisis-rohingya>.
- . 2017b. "Menlu Menuju Bangladesh Untuk Bahas Pengungsi Rohingya." <https://www.antaraneWS.com/berita/650746/menlu-menuju-bangladesh-untuk-bahas-pengungsi-rohingya>.
- Azizah, Indah Nur. 2017. "PERANAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENANGANAN MASALAH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR (2014-2017)." *Global Political Studies Journal* 1 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i2.2022>.

- Bangun, Budi Hermawan. 2018. "Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4 (3): 569–87. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a8>.
- BBC. 2017. "Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas Dalam Waktu Sebulan, Kata MSF." 2017. Sekitar 6.700 Muslim Rohingya tewas dalam waktu sebulan, kata MSF.
- Bilhaqqi, Dika. 2018. "PERANAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM KONFLIK ROHINGYA DI MYANMAR PADA TAHUN 2012-2018."
- CNN Indonesia. 2019. "Rumah Sakit Indonesia Di Rakhine Diserahkan Ke Myanmar."
- Dompot Dhuafa. 2017. "Komitmen AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar)." <https://ddsumsel.org/komitmen-akim-aliansi-kemanusiaan-indonesia-untuk-myanmar/#:~:text=Kami%20Aliansi%20Kemanusiaan%20Indonesia%20untuk%20Myanmar%20%28AKIM%29%20merupakan,%28Kementerian%20Luar%20Negeri%29%20dan%20seluruh%20elemen%20Masyarakat%20Indonesia>.
- Fathun, Laode Muhamad. 2018. "Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Dalam Perspektif Konstruktivisme." *Journal of Islamic World and Politics* 2 (2): 319–44. <https://doi.org/10.18196/jiwp.2219>.
- Humas Setkab. 2017. "Soal Bantuan Untuk Rohingya, Menlu: Tunggu List Myanmar, Bangladesh Segera Dikirim."

- Indra, Erizon. 2018. “Kepatuhan Negara-Negara ASEAN Untuk Tidak Campur Tangan Dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya Di Myanmar.” *Journal of International Relations* 4:376–83.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21046/19697>.
- IPAC. 2018. “Indonesia and The Rohingya Crisis.”
- Jati, Irawan. 2017. “Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis.” *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*.
- Jordy Adam, Verry. 2019. “Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya.”
- Kementerian Luar Negeri. 2017. “Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan.”
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Komitmen-Bantu-Myanmar,-Menlu-Luncurkan-Program-Bantuan-Kemanusiaan.aspx>.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2021. “Kontribusi Indonesia Senilai USD 200.000 Untuk Bantuan Kemanusiaan ASEAN Kepada Myanmar Mulai Didistribusikan Akhir September 2021.”
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2943/berita/kontribusi-indonesia-senilai-usd-200000-untuk-bantuan-kemanusiaan-asean-kepada-myanmar-mulai-didistribusikan-akhir-september-2021>.
- Kemlu. 2019. “Penandatanganan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan ASEAN Secretariat Mengenai Pemberian Bantuan Hibah Kepada Myanmar Melalui ASEAN Secretariat, 20 Desember

- 2019.” Kemlu.Go.Id. 2019. <https://kemlu.go.id/ptri-asean/id/news/4069/penandatanganan-perjanjian-antara-pemerintah-republik-indonesia-dengan-asean-secretariat-mengenai-pemberian-bantuan-hibah-kepada-myanmar-melalui-asean-secretariat-20-desember-2019>.
- Kompas. 2017. “Indonesia Mulai Bangun Rumah Sakit Di Rakhine, Myanmar.”
- Kurniawan, Nalom. 2017. “Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights.” *Jurnal Konstitusi* 14:881–84. <https://media.neliti.com/media/publications/229111-kasus-rohingya-dan-tanggung-jawab-negara-f55bc391.pdf>.
- Leba, E. E. 2019. “Bantuan Indonesia Untuk Repatriasi Pengungsi Rohingya Mulai Bergulir.” Kompas.Id. 2019. https://www.kompas.id/baca/internasional/2019/12/20/bantuan-indonesia-untuk-repatriasi-pengungsi-rohingya-mulai-bergulir?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login.
- Lestari, Leni. 2017. “Indonesia Akan Bawa Konflik Rohingya Ke KTT OKI Dan Sidang Umum PBB.” Nasional.Okezone.Com. 2017. <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/05/337/1769735/indonesia-akan-bawa-konflik-rohingya-ke-ktt-oki-dan-sidang-umum-pbb>.
- Listiarani, Tirza. 2021. “Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia.” *Jurnal PIR : Power in*

International Relations 5 (1): 19–32.
<https://doi.org/10.22303/pir.5.1.2020.19-32>.

Matthew, Glen. 2020. “Kepentingan Nasional Dan Diplomasi Ala Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar.” *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun XIII, no. 1.

Maulana, Victor. 2017. “Menlu Retno Luncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar.”
<https://international.sindonews.com/berita/1235597/40/menlu-retno-luncurkan-aliansi-kemanusiaan-indonesia-untuk-myanmar>.

Mazrieva, Eva. 2017. “Bantu Atasi Krisis Rohingya, Menlu RI Sampaikan Usul ‘4+1.’” <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-atasi-krisis-rohingya-menlu-ri-sampaikan-usul-4-1/4014956.html>.

Minear, Larry, and Hazel Smith. 2007. *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*. Tokyo: United Nation University Press.

MSF. 2017. “The Rohingya: Persecuted across Time and Place.” 2017.
<https://www.msf.org/rohingya-refugee-crisis-depth>.

Permata, Inda Mustika, Nadya Hijrah D, and Anita A Sinulingga. 2019. “Humanitarian Diplomacy: Indonesia’s Response Toward Rohingya Humanitarian Crisis.” *Journal of Diplomacy and International Studies* 2 (01). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(01\).4422](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4422).

Permata, Indah Mustika, Nadya Hijrah D, and Anita A. Sinulingga. 2019. “Humanitarian Diplomacy: Indonesia’s Response Toward Rohingya Humanitarian Crisis.” *Journal of Diplomacy and International Studies* 1 (1): 1–12.

- Pramita, Nadia Tia, and M. Syaprin Zahidi. 2023. "Analisis Peranan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Di Era Jokowi." *Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)* 5 (1): 84–106. <https://doi.org/10.24252/rir.v5i1.34500>.
- Pramudiyani, Yashinta Difa, and Mohamad Anthoni. 2019. "Indonesia Beri Hibah Rp7,5 Miliar Bantu Repatriasi Pengungsi Myanmar." <https://www.antaraneews.com/berita/1217548/indonesia-beri-hibah-rp75-miliar-bantu-repatriasi-pengungsi-myanmar>.
- Purnama, Chandra, Windy Dermawan, and Ghiyats Akmaluddin. 2019. "Indonesia's Role towards Myanmar in Assisting to Resolve the Humanitarian Crisis in Rohingya (2014-2018)." *Central European Journal of International and Security Studies* 13 (4): 208–22.
- Rahmawati, Regi, and Ahmad Zakiyuddin. 2022. "PERAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM PENANGANAN ISLAMOPHOBIA DALAM KASUS ROHINGYA Oleh" 3 (2).
- ReliefWeb. 2017. "Construction of Indonesian Hospital in Rakhine State Begins." <https://reliefweb.int/report/myanmar/construction-indonesian-hospital-rakhine-state-begins>.
- Rini, Rina Ayu Panca, and Sugiyarto. 2017. "8 Kali Pengiriman, 74 Ton Bantuan Indonesia Untuk Rohingya Tiba Di Bangladesh ." <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/18/8-kali-pengiriman-74-ton-bantuan-indonesia-untuk-rohingya-tiba-di-bangladesh>.

- Rohingya Response. 2018. "Food Security." Rohingya Refugee Response Bangladesh. 2018.
- Sadewa, Dzikiara Pesona, Dudy Heryadi, and Taufik Hidayat. 2019. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya Di Bangladesh." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15 (2): 89–103. <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3108.89-103>.
- Sandoz, Yves. n.d. "Komite Palang Merah Internasional Sebagai Pengawal Hukum Humaniter Internasional (The International Committee of the Red Cross as Guardian of International Humanitarian Law)." ICRC.Org.
- Santri, *, Muh Zein Abdullah, and La Ode Muh Syahartijan. 2018. "PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA (STUDI KASUS PADA KONFLIK TAHUN 2012-2017)." *Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi & Informasi* 3 (4).
- Sekretariat Kabinet RI. 2018. "Bantu Presiden Myanmar, Presiden Jokowi Sampaikan Kesiapan Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya." <https://setkab.go.id/bertemu-presiden-myanmar-presiden-jokowi-sampaikan-kesiapan-bantu-pemulangan-pengungsi-rohingya/>.
- Setiawan, Ipung Pramudya, and Made Selly Dwi Suryanti. 2021a. "Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1 (2): 83–97. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>.

- . 2021b. “Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019).” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1 (2): 83–97.
<https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>.
- Sinaga, Yuni Arisandy. 2018. “Wamenlu Akan Hadiri KTM OKI Di Bangladesh.”
- Srikandini, A. G. 2017. “Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Di Myanmar.” Kompas.Id. 2017.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2017/09/08/diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di-myanmar>.
- Suwandari, Hana Dwi, and Sugito. 2021. “The Strategy of Indonesian Diplomacy Efforts and National Political Interests in the Ethnic Rohingya Refugee Conflict.” *JURNAL EKONOMI, SOSIAL, DAN KEMANUSIAAN INDONESIA* 3 (2): 131–43.
<https://doi.org/10.31258/ijesh.3.2.131-143>.
- Tabloid Diplomasi. 2018. “Apresiasi Atas Bantuan Indonesia.”
<https://www.tabloiddiplomasi.org/apresiasi-atas-bantuan-indonesia/>.
- Tempo.co. 2017. “Menteri Retno Akan Serahkan 10 Kontainer Bantuan Untuk Myanmar.” <https://nasional.tempo.co/read/837355/menteri-retno-akan-serahkan-10-kontainer-bantuan-untuk-myanmar>.
- . 2023. “Keliru, Bangladesh Tolak Pengungsi Rohingya Karena Mereka Memberontak Di Myanmar.”
- Teresia, Ananda, Kevin S Kurnianto, and Muhammad Iqbal. 2017. “JK Bahas Rohingya Bersama Pemimpin Negara Oki Di Sela Sidang PBB.”

<https://kumparan.com/kumparannews/jk-bahas-rohingya-bersama-pemimpin-negara-oki-di-sela-sidang-pbb/full>.

The International Development Committee. 2020. "Humanitarian Crises Monitoring : The Rohingya (Issue May)." [Www.Parliament.Uk](http://www.Parliament.Uk). 2020.

The Republic of the Union of Myanmar Ministry of Information. 2017. "Ministry of Information the Republic of the Union of Myanmar, 'Aid from Indonesia Headed to Myanmar.'" 2017. <https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/5/01/2017/id-9545>.

Tirto.id. 2017. "Menlu Retno: Indonesia Beri Bantuan Dukungan Di Rakhine." *Tirto.Id*. <https://tirto.id/menlu-retno-indonesia-beri-bantuan-dukungan-di-rakhine-cht1>.

UNHCR. 2019. "Rohingya Emergency."

Untoro, Yoga, Muchsin Idris, and Soekoyo Hardiwinoto. 2016. "Dalam Indonesia Berarti Persatuan Penandatanganan Deklarasi Bangkok." *Diponegoro Law Journal* 5:1–16.

Wahyudi, Herry, and Nikodemus Niko. 2023. "Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim : Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Di Myanmar Pendahuluan." *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 6 (1): 107–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/politea.v6i1.2035>.

Waluyo, Tri Joko. 2013. "Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar." *Jurnal Transnasional* 4 (2): 838–52.

Wijaya, Muhammad Farhan Aria. 2019. "PERAN PBB DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR."